

CASCADING DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Visi : **Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera**

Misi : 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2026	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET				
											2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Jumlah Wirausaha baru	Persen	16,67	26,67	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan start up wira usaha baru	%	18,33	21,67	23,33	25,00	26,67
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,80-4,80 %	2,90-3,50 %	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	jumlah dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	%	94,85	95,50	95,50	96,30	96,30

3	Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan	Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	Persen	0,50-2,00	3,50-5,00	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	18.7	18.94	19.19	19.43	19.68

										Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah KabupatenKota	Meningkatnya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan) tahun n dikurangi jumlah kasus penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan) tahun n-1
Program hubungan industrial	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang terdaftar dalam jaminan ketenagakerjaan dibagi jumlah seluruh tenaga kerja dikali 100	Persen	77,00	80,00	82,00	84,00	85,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan pendaftaran perjanjian kerja sama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial
										Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya jumlah perselisihan	Jumlah perselisihan tahun n dikurangi jumlah perselisihan tahun n-1
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Kemandirian Transmigran	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	jumlah transmigran yang diberdayakan dibagi jumlah seluruh transmigran dikali 100	Persen	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan pada tahap kemandirian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya jumlah pelaku industri potensial	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	Jumlah industri pengolahan yang bersertifikasi halal dibagi industri pengolahan dikali 100	Persen	0.45	0.7	0.94	1.16	1.37	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri potensial	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	Jumlah industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten dibagi jumlah seluruh industri kecil dikali 100	Persen	68,00	70,00	73,00	76,00	80,00	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi industri	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Jumlah aset dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh aset dikali 100	%	100	100	100	100	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung kinerja	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Jumlah target pemenuhan sarpras dibagi realisasi dikali 100	%	100	100	100	100	100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100				
	Meningkatnya keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	Jumlah program renja perangkat daerah dan RKPD dibagi jumlah seluruh program dikali 100	%	100	100	100	100	100				
										Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
										Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

										Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

SATUAN	TARGET					SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
	2022	2023	2024	2025	2026						2022	2023	2024	2025	2026
%	100	100	100	100	100	sub kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja makro	Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	100	100	100	100	100
						Penyusunan rencana tenaga kerja makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		persen	100	100	100	100	100
persen	0	16,28	18,78	17,49	18,44	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK dibagi jumlah seluruh paket pelatihan	persen	0	16,28	18,78	17,49	18,44
						Pengadaan sarana pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja							
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	Jumlah tenaga klerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di tahun n	Jumlah tenaga klerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di tahun -n dibagi Jumlah tenaga klerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di tahun n kali 100						
persen	3,0-5	3,26	3,26	3,5	3,69	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Persentase instruktur yang mendapatkan sertifikat kompetensi dibagi Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina kali 100						
persen	2,031	2,171	2,237	2,332	2,458	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peserta pelatihan yang lulus kopetensi	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktifitas dan daya saing tenaga kerja tingkat kabupaten/kota		dokumen					
%	22,14	23,62	25,21	26,67	28,17	Perluasan kesempatan kerja	Terlaksananya pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang					
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan bimbingan dan penyuluhan	Jumlah peserta bimbingan dan penyuluhan	orang					

						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)_Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI yang diberikan sosialisasi perlindungan ketenagakerjaan	Jumlah CPMI yang diberikan sosialisasi perlindungan ketenagakerjaan	Orang	80	85	90	95	100
Persen	25	25	25	25	25	Sub kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Terlaksananya penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi sarana hubungan industrial	orang	25	25	25	25	25
%	0	75	75	75	75	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah perusahaan yang memiliki saran hubungan industrial	jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Jumlah rencana kerja BP LKS bipartit yang disusun	orang	40	40	40	40	40
Persen	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Jumlah lokasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi							
Persen	100	100	100	100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri							
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Persentase penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri							
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Persentase penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri							

%	73,3	73,5	47,5	77,5	78,3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional yang tersedia		90	91	92	93	95
						Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terlaksana		50	50	50	60	60
						Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terlaksana		80	80	0	0	80



Wonosobo, 18 Februari 2025
 Mengetahui,
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN WONOSOBO
 Dr. PRAYITNO, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197108231992031002